

**ANALYSIS OF THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE ON
POVERTY WITH ECONOMIC GROWTH AS AN INTERVENING VARIABLE IN
DISTRICTS/CITIES IN CENTRAL JAVA**

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KEMISKINAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Nur Tiya Sari¹, Riko Setya Wijaya²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}
nurtiyasari20@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of regional-financial performance on poverty through economic growth as an intervening variable. The object of this study is districts/cities in Central Jawa, using a sample of 175 data consisting of 35 districts/cities during the period 2018-2022. This study uses path analysis with the help of the STATA 17 program. The results of this study show that the independence ratio has an insignificant negative effect on economic growth, while the effectiveness ratio and capital expenditure ratio have a significant positive effect on economic growth. The independence ratio and effectiveness ratio have a positive effect on poverty, but the capital expenditure ratio has an insignificant negative effect. Meanwhile, economic growth has a significant negative effect on poverty. Economic growth as an intervening variable is able to mediate the ratio of effectiveness and the ratio of capital expenditure to poverty, but is unable to mediate the ratio of regional financial independence to poverty.

Keywords: Regional-financial Performance, Economic Growth, Poverty

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan sampel berjumlah 175 data yang terdiri dari 35 kabupaten/kota selama kurun waktu 2018-2022. Penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan program STATA 17. Hasil penelitian ini menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas PAD dan rasio belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio kemandirian dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kemiskinan, namun rasio belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening* mampu memediasi rasio efektivitas PAD dan rasio belanja modal terhadap kemiskinan, namun tidak mampu memediasi rasio kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah terjadi sejak era reformasi pasca berakhirnya pemerintahan orde baru dengan harapan mampu meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan perekonomian daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menjadi landasan dalam melaksanakan otonomi daerah melalui UU No. 32/2004 yang kemudian dicabut dengan UU No. 23/2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, desentralisasi fiskal yang secara resmi dilaksanakan pada 1 Januari 2001 telah memberikan perubahan terhadap paradigma pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola sendiri keuangannya. Melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menjadi

prioritas utama pemerintah daerah dapat tercapai karena secara efektif memberikan ruang gerak bagi suatu daerah untuk lebih efisien dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu mengupayakan untuk memiliki kemandirian yang besar.

Kemandirian daerah merupakan indikator utama yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Bentuk kemandirian daerah dapat dilihat melalui pendapatan asli daerahnya yang mana semakin besar pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka akan semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan pemerintahan. Namun bukan berarti suatu daerah tidak lagi memerlukan transfer dana dari pemerintah pusat karena pada dasarnya Transfer ke Daerah (TKD) masih tetap diperlukan untuk menekan kesenjangan fiskal antardaerah maupun antara pusat dan daerah akibat perbedaan sumber daya (Sidig, 2018). Menurut UU No. 1/2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, komposisi Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dengan dana tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Pada hakikatnya, tercapainya kesejahteraan masyarakat tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik di daerah, APBD harus dapat memberikan kinerja yang baik. Menurut Mahsun (2016) kinerja adalah “gambaran mengenai tingkat

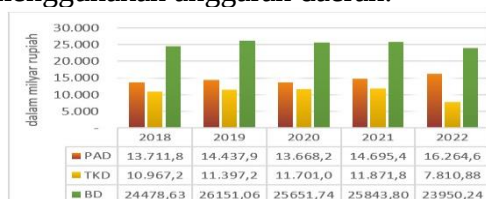
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menjadi tolak ukur suatu daerah dalam pembangunan, perencanaan, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan daerah lainnya sehingga perlu dilakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD yang telah dianggarkan dan direalisasikan diantaranya yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio keserasian belanja (Halim, 2012).

Besarnya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik juga terlihat dari pengalokasian belanja pemerintah daerah yaitu belanja modal. Belanja modal merupakan bentuk investasi pemerintah yang diarahkan untuk pembangunan aset tetap berupa fasilitas, sarana dan prasarana dengan tujuan menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Kinerja keuangan yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena berpengaruh terhadap kemajuan daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep value for money yang menurut Mardiasmo (2018) perlu diperhatikan oleh entitas sektor publik sebab merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi sendiri menurut Murni (2016) merupakan proses kenaikan output per kapita secara kontinu, yang berarti terjadi peningkatan produktivitas hingga menghasilkan perubahan standar hidup menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan perekonomian serta merupakan aspek penting bagi

suatu negara untuk mencapai kesejahteraan. Dengan perekonomian yang terus tumbuh maka perbaikan gizi dan kesehatan, serta pendidikan akan semakin baik, prospek lapangan kerja pun akan meningkat dan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Masalah kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, melainkan juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar seperti sandang, pangan, papan, termasuk juga kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Imanto, R. dkk., 2020). Secara umum salah satu kegiatan dan program prioritas pemerintah daerah yaitu mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga pengelolaan desentralisasi fiskal yang optimal khususnya dalam hal desentralisasi pengeluaran sangat diperlukan untuk memberikan respon lebih cepat terkait kebutuhan-kebutuhan dasar Masyarakat dengan begitu anggaran pengeluarannya pun dapat teralokasi secara efektif dan efisien (Laraswati, 2017).

Jawa Tengah menjadi provinsi yang seringkali mendapatkan penghargaan khususnya dalam hal keuangan. Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menobatkan Jawa Tengah sebagai provinsi penggerak keuangan inklusif nasional terbaik. Jawa Tengah juga memperoleh penghargaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Award 2020 yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB setelah predikat serupa diterima pada 2019 lalu karena keefisienannya dalam menggunakan anggaran daerah.



Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah, dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa penerimaan PAD Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup baik dalam hal mengelola keuangan daerah. Penerimaan PAD terbesar diperoleh pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp16.264,62 miliar atau 99,38% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp16.366,55 miliar. Namun pada tahun 2020 PAD Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar Rp769,63 miliar. Penurunan PAD ini memang tidak dapat dihindari imbas terjadinya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Sementara itu, di tahun 2020 dana transfer menunjukkan peningkatan sebesar Rp11.702,10 miliar. Adapun komposisi dana transfer tersebut didominasi oleh DAK sebesar Rp7.334,54 miliar, sementara DAU sebesar Rp 3.438,71 miliar, dan DBH sebesar Rp 870,81 miliar.

Penurunan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2020 tersebut, tentu saja berdampak pada penurunan jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk belanja. Pada tahun 2020 belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp499,32 miliar dari tahun 2019, berbeda dengan 5 tahun sebelumnya yang terus mengalami peningkatan. Belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah yang semakin meningkat setiap tahunnya akan mempengaruhi kondisi makroekonomi yang dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan daerah. Menurut Musgrave (1959) dan Oates (1972)

keterkaitan yang erat antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah dalam memakmurkan perekonomian suatu daerah.

Selama kurun waktu 2015-2022 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar -2,65%.



Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut juga merupakan imbas dari adanya pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh seluruh wilayah di Indonesia. Sektor yang paling terdampak di Provinsi Jawa Tengah yaitu sektor transportasi dan pergudangan dengan penurunan sebesar 32,38%. Jika diperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebelum adanya pandemi dapat dikatakan baik, tingkat kemiskinan pun juga mengalami penurunan meskipun persentase tersebut masih menjadi perhatian. Dapat dilihat pada gambar 1.3 bahwa Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi kedua dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dan masih berada diatas rata-rata kemiskinan nasional yang hanya mencapai 9,74%.



Gambar 3. Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat pula bahwa kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2020 sebagai dampak dari adanya pandemi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah kembali meningkat dan berada diangka 11,41%. Intervensi kembali perlu dilakukan terhadap tingkat kemiskinan yang masih cenderung tinggi sehingga permasalahan terkait tingkat kemiskinan tersebut dapat teratasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2008) menemukan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian¹, rasio kemandirian², dan rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan terdapat pengaruh negatif dan signifikan. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Faritz, dkk. (2020) dan Madyasari (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki arah yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Kumpangpune dkk. (2019) yang mana rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menunjukkan hasil yang negatif dan tidak signifikan. Selain itu, Astuti dan Mispiyanti (2019) dalam penelitian mereka terkait kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah dengan indikator kemandirian,

efisiensi, efektivitas, belanja operasi, belanja modal, pertumbuhan, ketergantungan, dan derajat desentralisasi menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut karena belum optimalnya upaya pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat Berdasarkan uraian latar belakang bahwa suatu daerah dengan pengelolaan keuangan yang ekonomis, efektif, dan efisien akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan peluang terbukanya banyak lapangan pekerjaan yang selanjutnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Namun terdapat perbedaan pada hasil beberapa studi yang telah dilakukan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section* atau biasa disebut data panel. Data terdiri dari laporan APBD, PDRB harga konstan dan kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2022 yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pada penelitian ini, seluruh populasi sebanyak 175 data diambil sebagai sampel (*saturation sampling*). Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik pengaruh secara langsung maupun pengaruh tidak langsungnya melalui

variable intervening dengan bantuan program Stata17. Secara sistematis, terdapat dua persamaan struktural yang terbentuk dalam penelitian ini, yaitu:

$$PE = \beta_1 RK + \beta_2 RE + \beta_3 BM + \varepsilon_1$$

$$POV = \beta_1 RK + \beta_2 RE + \beta_3 BM + \beta_4 PE + \varepsilon_2$$

Keterangan:

RK = Rasio Kemandirian

RE = Rasio Efisiensi

BM = Rasio Belanja Modal

PE = Pertumbuhan Ekonomi

POV = Tingkat Kemiskinan

$\beta_1, \beta_2, \beta_n$ = koefisien

$\varepsilon_1, \varepsilon_2$ = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sumber: Data sekunder diolah

Var.	Obs	Min	Max	Mean	Std. Dev.
POV	175	3.98	17.83	10.8634	3.44626
PE	175	-10.28	6.81	3.56748	3.05487
RK	175	11.0569	105.069	25.5868	14.4618
RE	175	69.4366	174.659	109.851	17.7047
BM	175	5.31377	27.3534	14.6415	4.59213

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata sebesar 10,86 persen dengan kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebesar 17,83 persen dan terendah terjadi di Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar 3,98 persen. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata sebesar 3,57 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Semarang pada tahun 2019 sebesar 6,81 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar -10,28 persen Kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berupa rasio kemandirian rata-

rata sebesar 25,59 persen dengan rasio kemandirian tertinggi terjadi di Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 105,07 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Blora pada tahun 2018 sebesar 11,06 persen, rasio efektivitas rata-rata sebesar 109,85 persen dengan rasio efektivitas tertinggi terjadi di Kabupaten Sragen pada tahun 2021 sebesar 174,66 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 69,44 persen, dan rasio belanja modal rata-rata sebesar 14,64 persen dengan rasio belanja modal tertinggi terjadi di Kota Surakarta pada tahun 2018 sebesar 27,35 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Kendal pada tahun 2020 sebesar 5,31 persen.

Analisis Regresi Data Panel

Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan pemilihan model estimasi terbaik antara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect*.

Uji Chow

Uji Chow Persamaan Struktur I

Statistic F(34, 137)	Nilai Prob>F	Kesimpulan
1.62	0.0280	H ₀ ditolak, model terpilih adalah <i>Fixed Effect Model</i> pada tingkat $\alpha = 5\%$

Sumber: Data sekunder diolah

Uji Chow Persamaan Struktur II

Statistic F(34, 136)	Nilai Prob>F	Kesimpulan
289.32	0.0000	H ₀ ditolak, model terpilih adalah <i>Fixed Effect Model</i> pada tingkat $\alpha = 5\%$

Sumber: Data sekunder diolah

Hasil uji chow diperoleh nilai (Prob>F) lebih kecil dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,0000 < 0,05) maka H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya model terpilih dari kedua persamaan struktur tersebut adalah *Fixed Effect*

Model sehingga perlu dilakukan uji selanjutnya yaitu Uji Hausman.

Uji Hausman

Uji Hausman Persamaan Struktur I

Statistic Chi2(3)	Nilai Prob>Chi2	Kesimpulan
46.54	0.0000	H ₀ ditolak, model terpilih adalah <i>Fixed Effect Model</i> pada tingkat $\alpha = 5\%$

Sumber: Data sekunder diolah

Uji Hausman Persamaan Struktur II

Statistic Chi2(4)	Nilai Prob>Chi2	Kesimpulan
32.71	0.0280	H ₀ ditolak, model terpilih adalah <i>Fixed Effect Model</i> pada tingkat $\alpha = 5\%$

Sumber: Data sekunder diolah

Hasil uji hausman diperoleh nilai (Prob>Chi2) lebih kecil dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,0000 < 0,05) maka H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya model terbaik persamaan struktur I dan II yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Asumsi Klasik

Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas

	PE	LN_RK	LN_RE	LN_BM
PE	1.0000			
LN_RK	-0.0126	1.0000		
LN_RE	0.1343	-0.0173	1.0000	
LN_BM	0.3342	0.1919	0.0052	1.0000

Sumber: Data sekunder diolah

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai koefisien korelasi antar variabel independen kurang dari 0,9. Sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dari masing-masing variabel pada persamaan yang digunakan.

Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas Persamaan Struktur I

Chi2 (35)	Prob>Chi2	Kesimpulan
510.34	0.0000	Pada tingkat $\alpha=5\%$ berarti bahwa pada model terdapat masalah heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah

Uji Heteroskedastisitas Persamaan Struktur II

Chi2 (35)	Prob>Chi2	Kesimpulan
727.07	0.0000	Pada tingkat $\alpha=5\%$ berarti bahwa pada model terdapat masalah heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan Wald Test menunjukan bahwa nilai prob>chi2 pada persamaan struktural I dan persamaan struktural II adalah 0.0000 yang mana nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

Autokorelasi

Uji Autokorelasi Persamaan Struktur I

F (1,34)	Prob>F	Kesimpulan
37.99	0.0000	Pada tingkat $\alpha=5\%$ berarti bahwa pada model terdapat masalah heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah

Uji Autokorelasi Persamaan Struktur II

F (1,34)	Prob>F	Kesimpulan
13.942	0.0007	Pada tingkat $\alpha=5\%$ berarti bahwa pada model terdapat masalah heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Wooldridge Test

menunjukan bahwa nilai prob>F pada persamaan struktural I dan persamaan struktural II menunjukan nilai probabilitas yang lebih kecil dari $\alpha=5\%$ atau 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi.

Dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kedua model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini melanggar asumsi klasik berupa heteroskedastisitas dan autokorelasi. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi pada data panel dapat dilakukan dengan melakukan transformasi menggunakan metode *generalized least square* (GLS).

Model Fixed Effect Model (FEM) Metode GLS

		Persamaan Struktural I	Persamaan Struktural II
Dependent Variabel			
		Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Kemiskinan (POV)
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Coef.		-0.0047347
	Std. err		0.000906
	t-stat		-5.23
	Prob		0.000
Rasio Kemandirian (LN_RK)	Coef.	-2.097872	0.083725
	Std. err	1.954313	0.0235006
	t-stat	-1.07	3.56
	Prob	0.283	0.000
Rasio Efektifitas (LN_RE)	Coef.	7.218723	0.0633508
	Std. err	1.973846	0.0245452
	t-stat	3.66	2.58
	Prob	0.000	0.010
Rasio Belanja Modal (LN_BM)	Coef.	6.28907	-0.0005896
	Std. err	0.8676955	0.0118585
	t-stat	7.25	-0.05
	Prob	0.000	0.960
Konstanta (_Cons)	Coef.	-44.3762	1.854823
	Std. err	8.476328	0.1092605
	t-stat	-5.24	16.98
	Prob	0.000	0.000
R ²		0.3336	0.3343
Prob > Chi2		0.0000	0.0000

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Models* (FEM), pada persamaan struktur I dan II diperoleh nilai $\text{prob} > \text{Chi}^2$ sebesar 0,0000, lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada persamaan struktur I, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Belanja Modal (variabel independen) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (variabel dependen), begitu juga dengan persamaan struktur II, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi (variabel independen) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan (variabel dependen).

Pada persamaan struktur I menunjukkan nilai R Square sebesar 0,3336 menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Belanja Modal mampu menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 33,36%, sedangkan sisanya sebesar 66,64% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Pada persamaan struktur II menunjukkan nilai R Square sebesar 0,3343 menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi mampu menjelaskan Tingkat Kemiskinan sebesar 33,43%, sedangkan sisanya sebesar 66,57% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Selanjutnya uji validitas model di dalam analisis jalur dilakukan dengan menghitung koefisien determinan total menggunakan rumus berikut:

$$R^2_m = 1 - P\varepsilon_1^2 P\varepsilon_2^2$$

$$R^2_m = 1 - (0.8163)^2 (0.8159)^2$$

$$R^2_m = 0.5564$$

Nilai koefisien determinasi total sebesar 0,5564 dapat diartikan bahwa total keragaman data yang dapat

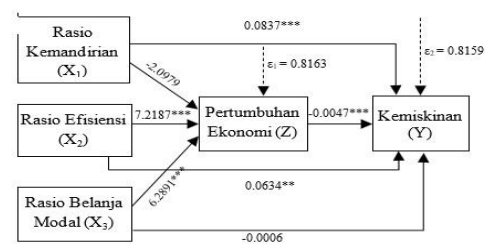
dijelaskan dalam penelitian ini adalah 55,64% sedangkan sebesar 10,22% sisanya dijelaskan oleh variabel lain (diluar model penelitian) dan error.

Analisis Jalur

Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung antara variabel independent terhadap variabel dependen maupun pengaruh tidak langsung melalui variabel intervening. Setelah sebelumnya dilakukan pengujian regresi dan diperoleh nilai koefisien jalurnya, maka dapat disusun model lintasan pengaruh sebagai berikut:

$$P\varepsilon_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.3336} = 0.8163$$

$$P\varepsilon_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.3343} = 0.8159$$



Gambar 4. Model Lintasan Pengaruh

Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi ($X_1 \rightarrow Z \rightarrow Y$) $(p_{x_1z})(p_{zy}) = (-2,0979)(-0,0047) = 0,0098$.

Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi ($X_2 \rightarrow Z \rightarrow Y$) $(p_{x_2z})(p_{zy}) = (7,2187)(-0,0047) = -0,0339$.

Pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi ($X_3 \rightarrow Z \rightarrow Y$) $(p_{x_3z})(p_{zy}) = (-6,2891)(-0,0047) = -0,0296$.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung	

$X1 \rightarrow Z$	-2.0979		
$X2 \rightarrow Z$	7.2187		
$X3 \rightarrow Z$	6.2891		
$Z \rightarrow Y$	-0.0047		
$X1 \rightarrow Y$	0.0837	0,0098	0,0935
$X2 \rightarrow Y$	0.0634	-0,0339	0.0295
$X3 \rightarrow Y$	-0.0006	-0,0296	-0.0302

Pengujian Hipotesis

Uji t

Hasil Uji t Persamaan Struktur I

Variabel	Prob.	t_{hitung}	t_{tabel} (171; 0.025)
Rasio Kemandirian	0.283	-1.07	1.97393
Rasio Efektivitas	0.000	3.66	
Rasio Belanja Modal	0.000	7.25	

Hasil pengujian secara parsial pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,07 < 1,97393$) dan memiliki nilai probabilitas $0,283 > 0,05$. Maka H_0 diterima yang berarti terdapat pengaruh tidak signifikan bertanda negatif antara Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,66 > 1,97393$) dan memiliki nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh signifikan bertanda positif antara Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Rasio Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,25 > 1,97393$) dan memiliki nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh signifikan bertanda positif antara Rasio Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil Uji t Persamaan Struktur II

Variabel	Prob.	t_{hitung}	t_{tabel} (171; 0.025)
Pertumbuhan Ekonomi	0.000	-5.23	1.97402
Rasio Kemandirian	0.000	3.56	
Rasio Efektivitas	0.010	2.58	
Rasio Belanja Modal	0.960	-0.05	

Hasil pengujian secara parsial pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-5,23 > 1,97402$) dan memiliki nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh signifikan bertanda negatif antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Rasio Kemandirian terhadap Tingkat Kemiskinan diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,56 > 1,97402$) dan memiliki nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh signifikan bertanda negatif antara Rasio Kemandirian terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Rasio Efektivitas terhadap Tingkat Kemiskinan diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,58 > 1,97402$) dan memiliki nilai probabilitas $0,010 < 0,05$. Maka H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh signifikan bertanda positif antara Rasio Efektivitas terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Rasio Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,05 < 1,97402$) dan memiliki nilai probabilitas $0,960 > 0,05$. Maka H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh signifikan bertanda positif antara Rasio Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Uji Mediasi

Hasil Sobel Test Calculator

Variabel	z	p-value
Rasio Kemandirian	1.051	0.293
Rasio Efektivitas	-2.996	0.003
Rasio Belanja Modal	-4.238	0.000

Berdasarkan hasil perhitungan sobel test di atas bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memediasi hubungan pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Tingkat Kemiskinan, dibuktikan dengan nilai z sebesar $1,05 < 1,96$ pada tingkat signifikansi 5%. Pertumbuhan Ekonomi memediasi hubungan pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Tingkat Kemiskinan, dibuktikan dengan nilai z sebesar $-2,99 > 1,96$ pada tingkat signifikansi 5%. Pertumbuhan Ekonomi memediasi hubungan pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan, dibuktikan dengan nilai z sebesar $-4,23 > 1,96$ pada tingkat signifikansi 5%.

Pembahasan

Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki arah hubungan negatif. Sebagian besar kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemandirian yang sangat rendah atau belum dapat membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Kemandirian fiskal menuju kesejahteraan masyarakat mengalami stagnansi sebab masih terdapat banyak daerah yang bergantung pada dana transfer. Dilihat dari komposisi pendapatan daerah di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, dana transfer masih sangat mendominasi dengan rata-rata diatas 50 persen di bandingkan dengan PAD yang hanya berkisar 29,67 persen. Sebagian besar sumber PAD berasal dari sektor industri yang masih terkonsentrasi di beberapa kabupaten/kota saja sementara mayoritas daerah di Jawa Tengah berbasis pertanian sehingga berdampak pada persebaran perekonomian yang

tidak merata antara daerah yang bercorak agraris dan nonagraris.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola potensi pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD kurang optimal. Sejauh ini, desentralisasi fiskal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyediaan layanan publik yang dapat mendorong perekonomian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurulita, dkk. (2018), Astuti dan Mispiyanti (2019), dan Luthvia, dkk. (2023) bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil ini tidak sejalan dengan temuan Ratnawati, dkk. (2023) yang menemukan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan memiliki peran yang signifikan dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki arah hubungan positif. Keefektifan daerah dalam memaksimalkan pengelolaan anggaran membuat pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatannya tersebut untuk menggerakkan perekonomian. Berdasarkan teori federalisme fiskal, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri guna meningkatkan keefektifan penyelenggaraan pemerintahan. Selama periode 2018-2022 sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dikatakan telah mampu memobilisasi

penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan yang mana dibuktikan dengan tingkat pencapaian rata-rata melebihi 100 persen yaitu sebesar 125,62 persen, termasuk ke dalam kategori sangat efektif dan telah memenuhi konsep *value for money*. Selanjutnya, daerah yang efektif secara keuangan mampu mencapai keberhasilan akan program-program yang ditargetkan dan berdampak positif pada masyarakat, sehingga kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan (Azhari, dkk., 2020). Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Sari et al., (2019) juga menemukan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara yang mencerminkan keberhasilan tercapainya sasaran, berarti semakin efektif.

Rasio Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki arah hubungan positif. Semakin tinggi belanja modal yang dialokasikan, maka dapat menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus (positif) dengan nilai tabungan atau investasi. Berdasarkan publikasi Ditjen Anggaran (2016) pengeluaran investasi dimaksudkan untuk pembentukan stok barang modal di masa depan dengan harapan dapat memberikan *multiplier effect* yang signifikan dan berkelanjutan. Rasio belanja modal dalam APBD merupakan gambaran besar kecilnya investasi daerah.

Investasi pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat meningkatkan aktiva tetap daerah, yang pada gilirannya

akan menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang. Pengadaan infrastruktur merupakan salah satu poin penting dari belanja modal yang berdampak langsung terhadap masyarakat karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata (Waryanto, 2017). Alokasi belanja modal di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi belanja modal sebesar 10,11 persen dari total belanja. Meskipun rasio belanja modal tersebut termasuk rendah, namun terbukti dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menjadi *milestone* bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja modal. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2017) dan Zulkarnain, dkk. (2020) bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki arah hubungan negatif. Sejalan dengan pandangan Simon Kuznet mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, yang menyatakan bahwa Tingkat kemiskinan menurun seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, peningkatan pertumbuhan ekonomi terbukti dapat mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan strategi umum pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 dengan tegas menyatakan keberpihakannya kepada rakyat miskin

melalui pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Dilansir dari portal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, beberapa program seperti renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jambanisasi, bantuan kepada keluarga miskin, pemasangan listrik gratis telah dilaksanakan dan dikelola dalam satu program unggulan melalui gerakan Satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Satu Desa Dampingan sehingga penurunan kemiskinan di Jateng menjadi signifikan. Perusahaan swasta juga memiliki peran besar seperti menyediakan lapangan kerja dan memberikan bantuan sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Pertumbuhan ekonomi yang bersifat *pro poor growth* akan mempengaruhi tingkat pengangguran karena dapat menyerap tenaga kerja dan terjadi peningkatan pendapatan yang pada akhirnya menurunkan angka kemiskinan sebab adanya efek pemerataan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faritz, dkk. (2020) bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Hasil serupa juga ditemukan oleh Madyasari (2021) di Kota Tasikmalaya yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Rasio Kemandirian terhadap Kemiskinan

Rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki arah hubungan positif. Hasil ini bertentangan dengan tujuan umum pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan begitu kinerja

perekonomian daerah juga akan meningkat dan pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan. Tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih sangat rendah, pendapatan asli daerah yang diperoleh belum dapat mengatasi permasalahan kemiskinan sehingga dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan sebagian besar masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Disamping itu, potensi daerah yang berbeda-beda pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah membuat persebaran perekonomian tidak merata, menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat akhirnya menambah angka kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmara dan Suci (2014) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara Astuti dan Mispian (2019) menyatakan bahwa kemandirian tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sejalan dengan temuan Ani dan Dwirandra (2014), Kumpangpune, dkk. (2019), Riskiyani dan Nasir (2021) yang menyatakan bahwa variabel rasio kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Rasio Efektivitas terhadap Kemiskinan

Rasio Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki arah hubungan positif. Dilihat dari postur pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mampu melebihi target anggaran, dapat dikatakan bahwa sebagian besar daerah memiliki nilai rasio efektivitas yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata melebihi 100 persen dan termasuk ke

dalam kategori sangat efektif. Dalam rangka mengidentifikasi efektivitas kebijakan penanganan kemiskinan, diperlukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani kemiskinan. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran untuk penanganan kemiskinan sesuai hasil pemetaan atas potensi dan kebutuhan riil daerah. Menurut DJPK, kegiatan-kegiatan terkait belanja penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah banyak diperuntukkan untuk belanja yang sifatnya tidak langsung dan masih didominasi kegiatan yang terkait pengurangan beban pengeluaran masyarakat sedangkan kegiatan terkait peningkatan pendapatan masyarakat masih belum banyak dianggarkan. Distribusi penerima manfaat belanja bansos di Jawa Tengah masih belum ideal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tias (2015) yang mana rasio efektivitas berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan keputusan pemerintah terkait tarif pajak dan retribusi daerah. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Kumpangpune, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kota Bitung.

Rasio Belanja Modal terhadap Kemiskinan

Rasio belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki arah hubungan negatif. Belanja modal sebagai bentuk investasi pemerintah daerah dapat meningkatkan produktivitas dan menambah pendapatan masyarakat yang akhirnya akan

mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurske bahwa belanja modal memiliki sifat berbanding terbalik (negatif) dengan kemiskinan. Namun, belanja modal di sebagian besar kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah belum mampu mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan belanja modal pada APBD memiliki fokus untuk meningkatkan aset daerah dalam menunjang perekonomian. Sehingga program/kegiatan dengan alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah secara langsung kurang berdampak terhadap masyarakat miskin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syamsul (2020) yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Selain itu penelitian Priambodo, A. P, dkk. (2024) juga turut mendukung hasil penelitian ini. Namun berbeda dengan temuan Kaligis, E., dkk. (2017) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Rasio Kemandirian terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini variabel pertumbuhan ekonomi tidak dapat memediasi pengaruh antara rasio kemandirian dan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022 dikarenakan tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Kemandirian fiskal menuju kesejahteraan masyarakat mengalami

stagnansi sebab masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak dapat memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan.

Rasio Efektivitas terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini variabel pertumbuhan ekonomi terbukti dapat memediasi pengaruh antara rasio efektivitas dan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022 dikarenakan tingkat efektivitas sebagian besar daerah di Jawa Tengah melebihi 100 persen yang artinya program-program yang ditargetkan berhasil dilakukan dan bermanfaat bagi rakyat, sehingga kesejahteraan meningkat yang diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan.

Rasio Belanja Modal terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio belanja modal secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini variabel pertumbuhan ekonomi terbukti dapat memediasi pengaruh antara rasio efektivitas dan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022 dikarenakan belanja modal yang dialokasikan untuk

pembangunan infrastruktur pelayanan publik dapat memberikan multiplier effect yaitu pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan.

PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari analisis kinerja keuangan daerah yang diukur dengan indikator rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio belanja modal terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan indikator rasio kemandirian secara langsung berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas dan rasio belanja modal secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, rasio kemandirian dan rasio efektivitas secara langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan, namun rasio belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan uji sobel rasio kemandirian secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan rasio efektivitas dan rasio belanja modal secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang hanya menggunakan tiga indikator kinerja keuangan daerah sebagai variabel independen juga penggunaan sampel yang hanya terbatas pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Saran untuk penelitian serupa

selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel kinerja keuangan lain dalam penelitian, seperti seperti rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan PAD, rasio derajat kontribusi BUMD, *debt service coverage ratio* serta dapat memperluas lokasi penelitian sebagai sampel dengan periode penelitian terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, N.L., & Dwirandra, A.A. (2014). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, DAN KEMISKINAN KABUPATEN DAN KOTA. *E-Jurnal Akuntansi*, 6, 481-497.
- Asmara, A., & Suci, S. C. (2019). PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(1).
- Astuti, S., & Mispiyanti, (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada Di Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers*, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 15 Oktober 2019, pp. 384-397.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah Edisi Maret 2024 (XLIII).
- Faritz, M. N., & Soejoto, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(1), 15-21.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ke-4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hamzah, A. (2008). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). Skripsi. Bangkalan.
- Imanto, R., Panorama, M., & Sumantri R. (2020). PENGARUH PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATRA SELATAN, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, pp. 118-139.
- Kaligis, E., Engka, D. S. M., & Tolosang K. D. (2017). PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KEMISKINAN DI MINAHASA UTARA MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI INTERVENING VARIABEL. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(2).
- Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. (2022). Kajian Fiskal Regional tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah.
- Kumpangpune, N., Saerang, D. P., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 60-77.
- Laraswati, R. (2017). 'PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA

- TIMUR TAHUN 2010-2015', Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang.
- Luthvia, A. W., Triyono, T., & Sasongko, N. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Intervening. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1861-1880.
- Madyasari, R. (2021). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. *JURNAL EKONOMI PERJUANGAN*, 3(2), 128-144.
- Mahsun, Mohammad. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi pertama Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*, Ed. 1, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Terbaru, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Murni, Asfia. (2016). *Ekonomika Makro*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung.
- Nurulita, S., Arifulsyah, H., & Yefni. (2018). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI RIAU, Jurnal Benefita, Vol. 3, No. 3, pp. 336-356.
- Priambodo, A.P., Hidayat, N.W. (2024). Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 8(1). p.1-14.
- Ratnawati, R., & Sari, R. P. (2023). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN DAN SUMATERA PERIODE 2020-2022). *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 125-133.
- Riskiyani, A., & Nasir, M. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 173-182.
- Sari, G.N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T.O. (2019). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PERKOTAAN DI SULAWESI UTARA TAHUN 2004 – 2014. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*.
- Syamsul, S. (2020). Desentralisasi fiskal dan tingkat kemiskinan di indonesia. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 17(1), 140-147.
- Tias, Niken N. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur 2011-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2).
- UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
- UU No. 1 Tahun 2022 Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Waryanto, P. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Indonesian treasury review: jurnal perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakan publik*, 2(1), 35-55. 3(1), 65-73.
- Zulkarnain, M., Astuti, Y., & Wiriani, E. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*,
<https://jatengprov.go.id/publik/penduduk-miskin-turun-terbanyak-nasional-ini-jurus-pemprov-jateng/>
<https://jateng.bps.go.id/>
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>